

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sampel dalam penelitian ini adalah aparatur daerah di 25 OPD Kota Magelang yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 112 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan uraikan pada bab iv, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kota Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Magelang telah berupaya untuk menciptakan aparatur pemerintah yang berkompeten. Dengan adanya upaya untuk terus meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap aparat pemerintah yang mendukung peningkatan kinerja maka akan tercipta pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan riil.
2. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kota Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang memiliki sasaran yang jelas akan mampu membantu setiap program/kegiatan

tercapai secara efisien. Oleh karena itu, dengan disusunnya anggaran yang jelas, spesifik, dan mudah dimengerti maka anggaran dapat diaplikasikan dengan jelas sesuai dengan tujuan. Pemerintah Kota Magelang setuju apabila kejelasan sasaran anggaran merupakan faktor dominan yang mendukung tujuan-tujuan instansi secara efektif. Semakin jelas alokasi dan penggunaan anggaran maka semakin bagus pula pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

3. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kota Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Magelang telah menerapkan sistem pengendalian internal terkait dengan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan yang dijalankan sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif maka akan tercipta proses kegiatan yang baik, sehingga pemerintah daerah mampu meminimalisir penyimpangan serta mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah. Semakin efektif sistem pengendalian internal maka semakin bagus pula pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas terkait dengan kompetensi aparatur pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dibuat oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan untuk menguji

kembali variabel-variabel tersebut berdasarkan data terkini, tepat, dan akurat. Berdasarkan uji koefisiensi determinasi, nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.426 yang berarti sebesar 42.6% variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi aparatur pemerintah (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2), dan sistem pengendalian internal (X3). Sedangkan sebesar 57.4% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Keterkaitan antara hasil penelitian ini dengan masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang yaitu sebagai masukan bagi pemerintah Kota Magelang dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, artinya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Magelang akan terus meningkat apabila dilakukan upaya peningkatan pada ketiga variabel independen dalam penelitian ini. Hal tersebut juga dapat digunakan sebagai upaya pemerintah Kota Magelang untuk mengatasi empat sasaran strategis yang belum tercapai secara efisien. Dengan adanya upaya kesinambungan antara perencanaan program/kegiatan dengan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, serta adanya monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, dan didukungnya sinergitas antar OPD untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi sesuai dengan peran masing-masing OPD guna mencapai target kinerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka hal tersebut akan membantu pemerintah Kota Magelang untuk mencapai sasaran strategis secara efisien.

## 5.2. Keterbatasan

1. Subjek dalam penelitian ini terbatas pada aparatur pemerintah di OPD Kota Magelang, sehingga akan terjadi perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan apabila penelitian dilakukan pada subjek penelitian yang berbeda.
2. Kesulitan dalam melakukan perizinan penelitian dikarenakan perizinan dilakukan melalui website [sicantik.go.id](http://sicantik.go.id) akan tetapi pada saat itu website sedang dilakukan perbaikan sehingga proses perizinan berjalan sedikit lebih lama daripada biasanya. Selain itu, beberapa data terkumpul dalam waktu yang lama karena mengingat dan memahami kesibukan responden yang berbeda-beda.

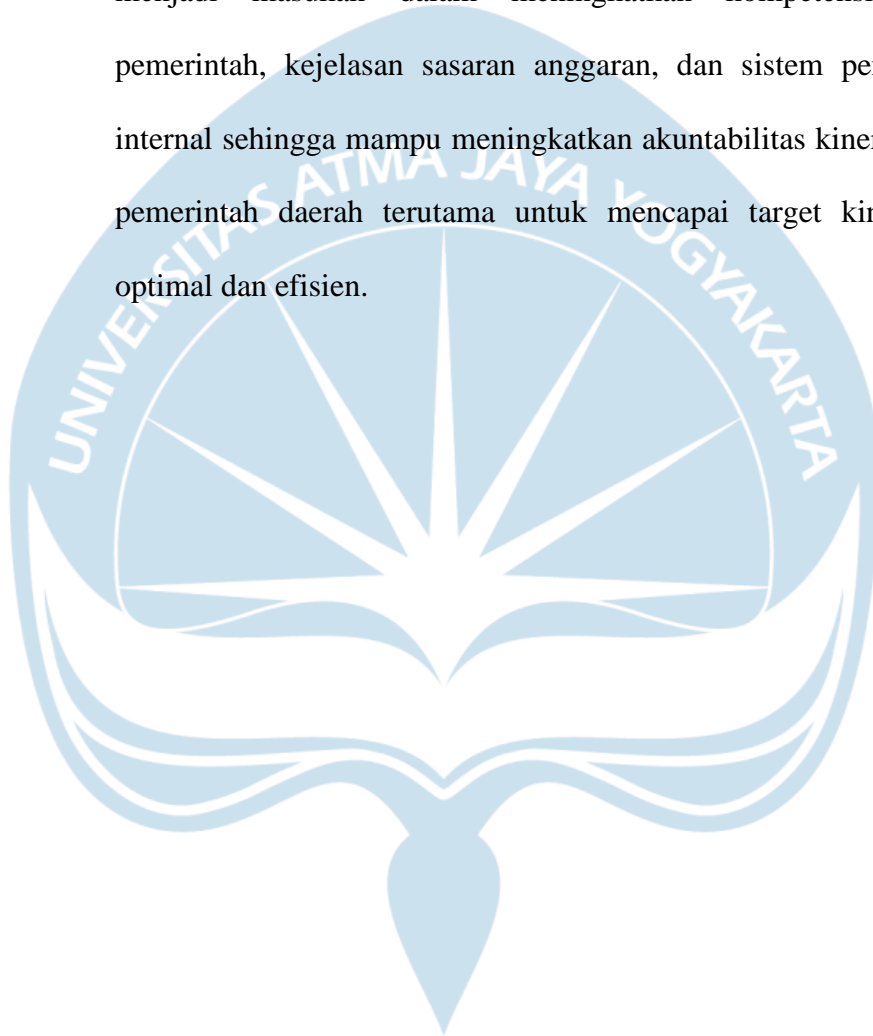
## 5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dipaparkan maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel dan metode yang sama tetapi populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga penelitian tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat beragam. Selain itu, peneliti selanjutnya lebih memperhatikan lagi waktu penyebaran kuesioner, agar kuesioner yang

telah diberikan tidak terlalu lama berada di kantor OPD dan tertumpuk dengan dokumen lain.

2. Bagi pihak aparatur pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian internal sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah terutama untuk mencapai target kinerja yang optimal dan efisien.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, K. (2018). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta)*. Skripsi: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ashari, Y. (2020). *Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Kantor Bpkad Kota Palopo)*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah, Palopo.
- Bernadine, R. (2018). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten*. Skripsi: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 5). Yogyakarta: BPFE.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 6). Yogyakarta: BPFE.
- Hutapea, P., dan Thoha, N. (2008). *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kenis, I. (1979). "Effects on Budgetary Goal Characteristic of Managerial Attitudes and Performance." *The Accounting Review* 54 (4), 707-721.

- Kulomo, Tjahjo (2020, Februari 26). *Raih Peringkat B, Pemkot Magelang Semangat Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja*. Retrieved from jatengprov.go.id: <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/raih-predikat-b-pemkot-magelang-semangat-tingkatkan-akuntabilitas-kinerja/>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
- Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Safitri, N. H. (2020). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen)*. Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Samosir, T. K. (2020). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan, dan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Tambuk, H. H. (2021). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Kinerja, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur*. Skripsi: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

